Mengintip Masa Depan

Oleh: Hendra Gunawan

Pemilihan umum anggota legislatif telah dilaksanakan dan hasilnya kini telah terpetakan. Karena tak ada satupun partai yang meraih suara 25% atau lebih, saat ini kita menyaksikan para pimpinan partai sibuk menjajagi koalisi, entah untuk membangun kerjasama atau dagang sapi.

Pada tanggal 9 Juli 2014 nanti, rakyat Indonesia akan kembali ke TPS untuk memilih siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Siapapun yang terpilih nanti, tampaknya negara kita akan dipimpin oleh kabinet pelangi lagi. Itu pertanda bahwa lima tahun ke depan panggung politik kita akan diwarnai banyak drama, seperti yang terjadi selama 15 tahun ke belakang.

10-20 Tahun Ke Depan

Bila kita kemudian tidak dapat berharap banyak pada Pemerintah yang akan datang karena alasan di atas, kepada siapa kita dapat menaruh harapan bahwa negara kita akan tetap eksis dan diperhitungkan dunia. Bila potret lima tahun ke depan masih agak suram, bagaimana nasib bangsa 10-20 tahun ke depan?

Panen boleh gagal, tapi selama kita masih memiliki benih kita masih mempunyai harapan. Dalam konteks pembangunan bangsa, 'lumbung benih' adalah tempat di mana anak bangsa ditempa dan dibangun kemampuannya, yaitu sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, terlebih di abad ke-21 ini, lumbung benih itu adalah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Namun, belakangan ini, kita juga tidak melihat adanya titik terang bahwa kita akan menikmati 'panen' berlimpah 10-20 tahun ke depan. Investasi kita untuk masa depan itu sangat minim.

Andrianto Handojo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional pun mengkhawatirkan masa depan bangsa, bila tidak ada upaya perbaikan yang segera dilakukan oleh para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah dan Pengusaha (*Kompas*, 10 April 2014).

Pada saat yang bersamaan, Daoed Joesoef, mantan Mendikbud RI periode 1978-1983, mengajak kita untuk memikirkan ulang pendidikan, sehubungan dengan tidak tumbuhnya komunitas ilmiah di perguruan tinggi kita (*Kompas*, 7 April 2014). Beliau resah karena berdasarkan sejarah, suatu bangsa bisa maju dalam peradaban hanya bila sub-komunitas ilmiahnya lebih maju dibandingkan dengan sub-komunitas lainnya.

Bahwa kita tertinggal dalam penguasaan iptek, padahal itu yang menentukan apakah kita sebagai bangsa akan tetap eksis dan berjaya di abad ini, juga telah membuat Sayidiman Suryohadiprojo yang mantan Gubernur Lemhanas risau. Menurut beliau, bangsa Indonesia hanya dapat hidup bahagia dan sejahtera bila kita bergotong-royong mengembangkan iptek modern, sesuai dengan tuntutan zaman (*Kompas*, 7 April 2014).

Tiga tokoh masyarakat telah menyatakan kerisauannya tentang masa depan bangsa. Bila saya bongkar arsip saya, masih banyak pernyataan keresahan serupa dari pemuka masyarakat lainnya. Sebutlah juga misalnya Bambang Hidayat, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia periode 2007-2008, yang di satu sisi gelisah dengan kurikulum nasional dan di sisi lain berharap Indonesia dapat turut berperan dalam arus kemajuan dunia (*Kompas*, 17 Juni 2013).

Siapalah saya bila saya kemudian menambahkan, melalui beberapa tulisan saya sebelumnya, bahwa kinerja perguruan tinggi di Indonesia selama ini sangat jauh dari harapan. Sebetulnya, bila kita menengok ke belakang, kesadaran akan ketidakberdayaan perguruan tinggi dalam mendukung perekonomian negara telah ada ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 yang lalu. Di institut tempat saya mengabdi, saat itu digagas perubahan tata kelola agar institut kami dapat berkontribusi lebih pada perekonomian negara.

Di tingkat nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun *Higher Education Long Term Strategies* (HELTS) 2003-2010, dan pada waktu yang hampir bersamaan meluncurlah

tujuh Perguruan Tinggi BHMN dengan skema pendanaan berupa *block grant*. Sayangnya, dukungan keuangan dari negara yang dinantikan tidak kunjung mengucur. UU Badan Hukum Pendidikan yang terbit pada tahun 2009 bukannya menjadi solusi malah memicu blunder, dan akhirnya dibatalkan serta menyeret PT BHMN kembali menjadi PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang ruwet.

Pada tahun 2012 yang lalu, UU Pendidikan Tinggi disahkan dan beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya pun kini telah terbit. Namun, terlalu naif bila kita kemudian mengganggap bahwa produk hukum ini merupakan kunci yang akan mendongkrak kinerja perguruan tinggi kita dalam pengembangan iptek, sementara kita tahu bahwa dukungan dana untuk itu tidak memadai.

Menurut hemat penulis, dana yang tersedia saat ini hanya cukup untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, tidak untuk bersaing dengan negara lain dalam pengembangan iptek. Baru-baru ini, Mendikbud mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tahun 2014 untuk pendidikan tinggi (di seluruh Indonesia) hanya Rp 3,2 triliun. Bandingkan dengan anggaran *National University of Singapore* (NUS) tahun 2013 yang mencapai Rp 18 triliun.

25-40 Tahun Ke Depan

Bila nasib bangsa 10-20 ke depan masih suram karena kita ternyata tidak bisa berharap pada perguruan tinggi kita yang seharusnya berperan sebagai 'lumbung benih', kepada siapa lagi kita harus menggantungkan harapan?

Dalam situasi seperti ini, satu-satunya yang harus kita jaga adalah anak-anak. Ya, mereka yang saat ini berada di bangku sekolah dasar, karena mereka lah yang akan mengawal bangsa ini 25-40 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang: apakah yang akan kita wariskan untuk mereka? Apakah misalnya Kurikulum 2013, yang disusun dengan tergesa-gesa itu, merupakan bekal yang mereka perlukan?

Kita tidak mempunyai ruang lagi untuk berbuat salah, kecuali kita tidak peduli bila bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tidak pernah terwujud, malah punah.

Bandung, 12 April 2014 (edit: 13 April 2014)